



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo, perlu mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola suatu organisasi sehingga tercapai hasil atau kinerja tinggi, maka perlu penetapan indikator kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Gorontalo adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Kota Gorontalo; dan
- b. IKU SKPD.

- (2) IKU Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEGUNAAN DAN PENETAPAN IKU

Bagian Pertama

Kegunaan

Pasal 5

IKU digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Penetapan IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Kota Gorontalo mengacu pada RPJMD Tahun 2014-2019.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Kota Gorontalo dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Kota Gorontalo paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 31 Desember 2014

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

DR.Hi. DARWIS SALIM, M.Sc,M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195703241977031003

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 29 TAHUN 2014
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
1	4	9	9
VISI : KOTA SMART			
MISI I Mewujudkan Kesetaraan bagi Masyarakat untuk Memperoleh Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Yang Terjangkau dan Berkualitas			
TUJUAN I : Terwujudnya Pemerataan Akses Layanan, Mutu dan Relevansi, dan Tata Kelola Pendidikan			
1 Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo	Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	DIKNAS	laporan dinas pendidikan
	% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
	% Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
2 Meningkatkan mutu dan Relevansi Pendidikan	Jumlah Pendidik yang berkualifikasi >= S1	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
	% Tingkat kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
	Rerata nilai Kelulusan UN SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
3 Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pendidikan	Dokumen regulasi dan standar operasional prosedur	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah yang memiliki sertifikasi ISO	DIKNAS	laporan Dinas Pendidikan

9

6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
TUJUAN II : Meningkatnya aksesibilitas Layanan Kesehatan kepada masyarakat			
1 Seluruh masyarakat Kota mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Presentase Jumlah penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit yang berbasis lingkungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayan rumah sakit;	BLU RSUD Aloe Saboe	Laporan BLU RSAS
	AKB	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
	AKABA	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
	AKI	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
	Angka Gizi Buruk	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
	KEP	DIKES	Laporan Dinas Kesehatan
	AHH	DIKES	Laporan Dinas Kesehatan
3 Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	Dinas Kesehatan	Laporan Dinas Kesehatan
TUJUAN III Meningkatnya Kualitas Layanan Publik lainnya Kepada masyarakat			
2 Meningkatnya pelayanan KB yang menyeluruh dan bermutu	Persentase peserta KB aktif	BPMPKB	Laporan BPMPKB
3 Meningkatnya kualitas tata kelola layanan transportasi di Kota Gorontalo	Jumlah koridor moda transportasi massal yang aktif dan beroperasi dengan baik	PERHUBUNGAN	Laporan Dinas Perhubungan
4 Meningkatnya peran kepemudaan dalam pembangunan	Jumlah organisasi kepemudaan yang terlatih dalam mengelola kegiatan masyarakat	DISPORA	Laporan Dinas Pemuda dan Olah Raga
MISI II : Penguatan Daya Saing Kota Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa di Kawasan Teluk Tomini			
TUJUAN I Peningkatan Daya Saing Kota dalam perspektif pengembangan Information, Communication, Technology (ICT) dan Pangkalan data			
1 Seluruh SKPD memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Dokumen Assesment IT dan Master Plan Pengembangan IT	KPDE, Kominfo	Laporan KPDE
	Persentase jumlah SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan yang menggunakan jaringan ICT	KPDE, Seluruh SKPD	Laporan KPDE
	Persentase SKPD yang datanya bisa diakses secara elektronik (online)	KPDE	Laporan KPDE
4 Meningkatnya kompetensi dan penerapan teknologi tepat guna dalam menopang aktifitas masyarakat	Jumlah usaha industri dan perdagangan yang menerapkan TTG	PERINDAG KOP , UMKM DAN PM	Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
MISI III : Penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Primer lainnya			
TUJUAN I : Peningkatan daya saing UMKM, Koperasi untuk kemahadiran usaha ekonomi kreatif, perdagangan dan PM			
1 Meningkatkan Daya saing UMKM dan koperasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Usaha Mikro & Kecil terfasilitas dalam permodalan, penjaminan serta pembinaan manajemen usaha	PERINDAG KOP, UMKM DAN PM	Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM
2 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah koperasi mandiri, dan jaminan keberlanjutan manajemen yang handal Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran dalam peredaran barang dan jasa Persentase UTTP ditera	PERINDAG KOP, UMKM DAN PM PERINDAGKOP, UMKM DAN PM PERINDAGKOP, UMKM DAN PM	Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM
3 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, laju investasi dan peningkatan kualitas layanan perijinan	Jenis pelayanan perizinan SATAP yang berstandar layanan ISO Jumlah Usaha yang mengurus perizinan usaha Jumlah usaha mendapatkan fasilitasi pengurusan perizinan secara gratis, untuk beberapa jenis perizinan tertentu	KPPT KPPT PERINDAGKOP, UMKM DAN PM	Laporan KPPT Laporan KPPT Laporan Dinas PERINDAG KOP UMKM DAN PM
TUJUAN II : Pembedayaan Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan dan peternakan sebagai Usaha Ekonomi Kreatif yang berdaya saing			
1 Meningkatkan Produktivitas & Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan	Produktivitas Padi Per (Ha) Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Perikanan Laut	DKPPK DKPPK	Laporan DKPPK Laporan DKPPK
2 Kesehatan Hewan, RPH	Jumlah Kelompok tani yang naik kelas Pemula ke lanjut, Lanjut ke Madya dan Madya ke Utama Frekuensi Pengawasan Kesehatan Hewan dan Kesmavet Frekuensi Pengawasan Peredaran Pangan Asal Hewani	BP4K DKPPK DKPPK	Laporan BP4K Laporan DKPPK Laporan DKPPK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
TUJUAN III : Mendapatkan dan Memadatkan Usaha Baru sebagai upaya Peningkatkan Kesempatan Kerja, Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan			
1 Meningkatkan Lapangan Kerja , & Kapasitas Tenaga Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja	SOSNAKER	Laporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
2 Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial	Jumlah Penyelesaian kasus norma kerja dan Norma K3	SOSNAKER	Laporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
3 Meningkatkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Presentase jumlah penduduk miskin	BPMPKB	Laporan BPMPKB
MISI IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada Peningkatan Tata Kelola, Kapasitas Organisasi Pemerintah, dan Kualitas Sumber Daya Aparatur			
TUJUAN I : Mewujudkan Good Governance and Clean Government			
1 Seluruh jabatan PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI ditetapkan berdasarkan Sistem Recruitment dan Replacement. Aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme yang mem-perthingkatkan kapasitas, kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepanggkatan aparatur BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	PERSENTASE JUMLAH jabatan PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI YANG SESUAI DENGAN HASIL ANALISIS kompetensi, dedikasi, prestasi kerja, tingkat pendidikan dan kepanggkatan aparatur	BKD	Laporan BKD
	Dokumen Grand Design Postur dan Struktur Birokrasi Pemerintahan dan kebutuhan sumber daya aparatur	ORTALA DAN BKD	Laporan BKD
	Prosentase jumlah aparatur yang diberi reward and punishment	BKD	Laporan BKD
3 Seluruh UNIT KERJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	JUMLAH UNIT KERJA yang telah menerapkan SPIP	INSPEKTORAT	Laporan Inspektorat
4 Seluruh UNIT KERJA menerapkan SOP STANDAR PELAYANAN MIINIMAL Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	JUMLAH UNIT KERJA yang telah menerapkan regulasi dan SOP	ORTALA DAN SELURUH SKPD	Laporan Bagian Ortala
	Persentase SKPD yang MENGEMBANGKAN STANDAR PELAYANAN MIINIMAL	Bagian Ortala	Laporan Bagian Ortala
5 Seluruh SKPD melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel dalam pririnsip SMART	Jumlah SKPD dengan skala nilai LAKIP B	Inspektorat	Laporan Inspektorat
	Skala Penilaian LAKIP Kota Gorontalo	Bappeda	LHE KEMENPAN RB
	STANDARISASI PENYUSUNAN BERDASARKAN REGULASI DAN KETERCAPIAN PERINGKAT KUALITAS PENYUSUNAN LPPD	Bagian Pemerintahan	Laporan Bagian Pemerintahan

6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
	JUMLAH RENCANA AKSI DAN implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)	Bagian Pemerintahan	Laporan Bagian Pemerintahan
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	Laporan Evaluasi Data Bappeda
6 Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum	Jumlah PRODUK HUKUM yang dihasilkan	Bag. Hukum	Laporan Bagian Hukum
8 Seluruh SKPD komitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase jumlah media informasi Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat	KPDE	Laporan KPDE
	JUMLAH LAYANAN YANG DILIMPAHKAN KE KECAMATAN (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kecamatan	Laporan Kecamatan
	JUMLAH KECAMATAN Menjadikan Kecamatan sebagai penyedia perijinan dan non perijinan	Kecamatan	Laporan Kecamatan
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	DKCS	Laporan DKCS
TUJUAN II : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur			
1 Seluruh Aparatur Pemerintah Kota memiliki kapasitas dan Kompetensi professional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan	BKD, Seluruh SKPD	Laporan BKD
	Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti DIKLAT FUNGSIONAL DAN bimbingan teknis	BKD, Seluruh SKPD	Laporan BKD
TUJUAN III : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
1 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	JUMLAH JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIKELOLA SECARA ONLINE	DPPKAD	Laporan DPPKAD
	Opini BPK secara berkelanjutan	DPPKAD	LHE BPK
	Persentase jumlah aset daerah yang telah dinilai, dimanfaatkan dan terdokumentasi	DPPKAD	Laporan DPPKAD
MISI V : Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya			
TUJUAN 1 : Peningkatan Upaya pelestarian nilai-nilai keagamaan dan adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat			
1 seluruh kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan berbasis ASQ (adati hula-hulaa to sara'a, sara'a hula-hula'a to Qurani)	Jumlah dan presentase kelembagaan adat/kebudayaan Gorontalo	DISBUDPAR	Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata
	Jumlah-jumlah presentase penerapan nilai-nilai ASQ dalam kegiatan pendidikan dalam berbagai level	DISBUDPAR	Laporan Dinas Budaya dan Pariwisata ; Laporan Dinas Pendidikan
MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
TUJUAN I : Peningkatan daya dukung infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa lainnya			
1	1	4	9
1 Terpuhinya ketersediaan infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya	Jumlah ruas jalan kota dalam kondisi baik	Dinas PU	Laporan Dinas PU
	Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Dinas PU	Laporan Dinas PU
	Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai	Dinas Tata Kota dan pertamanan	Laporan Dinas Tata Kota dan Pertamanan
2 Keterjaminan keberlanjutan Seluruh kawasan potensi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan eksistensi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK)	Jumlah KEK dikembangkan	Dinas PU, PERINDAGKOP UMKM PM	Laporan Dinas PERINDAGKOP UMKM PM
TUJUAN II : Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Perumahan Kota			
1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas	Persentase jalur layanan sampah dan kawasan permukiman yang terlayani oleh armada sampah	Badan Lingkungan Hidup	Laporan BLH
	Persentase cakupan layanan air bersih perpipaan	Dinas PU	Laporan Dinas PU
2 Meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasarana dan sarana utilitas	Jumlah kawasan perumahan tertata dengan baik	Dinas PU dan Kimpraswil	Laporan Dinas PU
	Jumlah Rumah layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Dinas PU dan Kimpraswil	Laporan Dinas PU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SKPD	SUMBER DATA
1 Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur kota sebagai pusat pemerintahan, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan jasa lainnya	Jumlah ruas jalan kota dalam kondisi baik	Dinas PU	Laporan Dinas PU
	Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Dinas PU	Laporan Dinas PU
	Persentase kawasan strategis kota dan kecamatan yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai	Dinas Tata Kota dan pertamanan	Laporan Dinas Tata Kota dan Pertamanan
2 Keterjaminan keberlanjutan Seluruh kawasan potensi dan pertumbuhan ekonomi baru melalui elaborasi peran dan eksistensi Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK)	Jumlah KEK dikembangkan	Bagian Hukum, PERINDAGKOP UMKM PM	Laporan Dinas PERINDAGKOP UMKM PM
TUJUAN II : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman Kota			
1 Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan penyediaan sarana prasarana utilitas	Persentase jalur layanan sampah dan kawasan permukiman yang terlayani oleh armada sampah	Badan Lingkungan Hidup	Laporan BLH
2 Meningkatnya akses kawasan perumahan terhadap prasarana dan sarana utilitas	Jumlah Rumah layak huni yang dibangun dan ditingkatkan kualitasnya	Dinas PU dan Kimpraswil	Laporan Dinas PU dan Kimpraswil
TUJUAN III : Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata, dan ruang-ruang Publik lainnya			
1 Seluruh Kawasan Objek Wisata memiliki daya tarik dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca negara	Jumlah objek wisata unggulan dan potensial yang tertata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 Tersedianya ruang-ruang publik sebagai wadah interaksi dan bernilai manfaat produktif bagi masyarakat	Jumlah taman kota yang tertata baik	Dinas Tata Kota dan Pertamanan	Laporan Dinas Tata Kota dan Pertamanan
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olahraga untuk penyelenggaraan event-event olahraga	Jumlah sarana olahraga yang tertata	Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Dinas Pemuda dan Olah Raga

 WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERATURAN

NOMOR : / / /2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

.....

- Menimbang : a.
b.
c.
- Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

BAB III

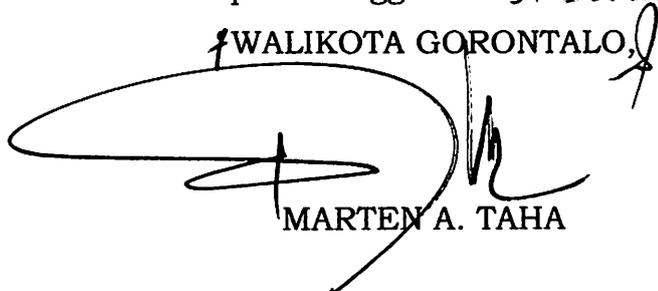
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ditetapkan :

pada tanggal : 31 Desember 2014

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : / 29 / TALUN / 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERATURAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR

NOMOR : / / /2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN/DINAS/KANTOR/

TUGAS :

FUNGSI :

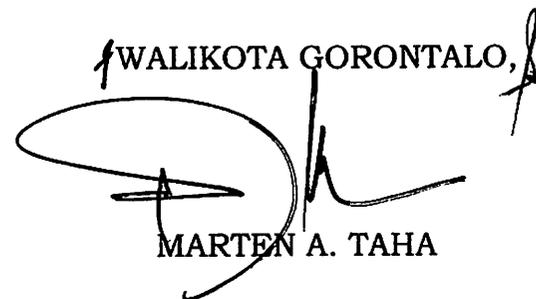
a.

b.

c.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

↓